

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA LAMABAYUNG KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR - NUSA TENGGARA TIMUR

Edisusanto Roman Nama

Drs. Teguh Santoso, M.Si

Drs. Radjikan, M.Si

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: edisusantoroman26@gmail.com

teguhuntsby@gmail.com

Radjikan@untag-sby.ac.id

Ringkasan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan kriteria yang digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemiskinan, rumah tidak layak huni merupakan salah satu ciri status masyarakat miskin. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, pemerintah mencari cara untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, antara lain menjadi Program Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laporan pengembangan masyarakat bahwa desa Lamabayung telah mendapat dukungan pemerintah untuk merenovasi rumah masyarakat dengan kemajuan yang sangat baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan BSPS Kabupaten Flores Timur dan faktor-faktor yang mempermudah dan membatasi penyelenggaraannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data primer, wawancara pengelola program yaitu Kementerian Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dan penerima manfaat program adalah Desa Lamabayung. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) Dinas Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan kabupaten Flores Timur pada Desa Lamabayung melalui perencanaan, pengorganisasian, pergerakan/pelaksanaan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ini adalah tingginya partisipasi pemerintah desa Lamabayung serta masyarakatnya. sedangkan faktor penghambatnya adalah keterlambatan pendropingan Bahan dan kurangnya tenaga kerja.

Kata kunci: Kemiskinan, program bantuan pembangunan perumahan mandiri, desa Lamabayung

Summary. Poverty is one of the social problems experienced by the Indonesian people. Based on the criteria used by the Central Statistics Agency to measure poverty, that the condition of

houses that are not suitable for habitation is one of the characteristics of the condition of poor people. To overcome this poverty problem, the government seeks to reduce uninhabitable houses, namely through the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS). This research was motivated by information that developed in the community that Lamabayung Village received assistance from the government to renovate community houses with very good progress. This study aims to determine the management of the Self-help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) by the Housing, Settlement and Land Areas of East Flores Regency as well as the supporting and inhibiting factors in its management. This study uses a qualitative descriptive method with the research subject being the program manager, namely the Department of Housing, Settlement and Land Areas in East Flores Regency and the recipient of the program, namely Lamabayung Village. Data obtained through primary data, namely interviews and secondary data through documents. This research uses management theory according to George R. Terry. The results of this study indicate that the Management of the Self-Help Housing Assistance Program (BSPS) by the Department of Housing, Settlement and Land in East Flores Regency in Lamabayung Village through planning, organizing, movement/implementation and supervision has been carried out well. The supporting factor in this management is the high participation of the Lamabayung village government and the community. while the inhibiting factors are delays in dropping materials and lack of manpower.

Keywords: Poverty, Self-help Housing Stimulant Assistance Program, Lamabayung Village

PENDAHULUAN

(INTRODUCTION)

Salah satu masalah sosial yang dialami bangsa Indonesia dari tahun ke tahun dan belum terselesaikan saat ini adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kuncoro (2003) dalam (Annisa Rahmah 2016:11). Salah satu masalah dari beberapa masalah sosial yang dialami bangsa Indonesia adalah Masalah kemiskinan. Kriteria yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur kemiskinan, bahwa salah satu ciri khas masyarakat miskin adalah memiliki rumah yang tidak layak huni. Rumah sebagai kendaraan yang sangat penting bagi setiap manusia, tempat tinggal dan fungsi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, dimana rumah adalah bangunan yang dianggap sebagai tempat tinggal yang baik, tempat orientasi keluarga, yang mencerminkan martabat dan harta benda pemilikinya. Perumahan dipahami yakni kumpulan rumah yang merupakan bagian dari permukiman kota dan pedesaan, dengan fasilitas dan layanan umum, sebagai bagian dari upaya penyediaan perumahan yang layak huni.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan fasilitas kepada masyarakat agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang nyaman. Program

yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Bantuan Stimulus Perumahan melalui Swadaya Masyarakat (BSPS). Bantuan insentif swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk insentif yang diberikan oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperkuat kemandiriannya dalam membangun dan meningkatkan kualitas perumahan, sarana dan prasarana umum. Mendukung Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permian PUPR) No. 07/PRT/M/2018. Departemen Bisnis dan Departemen Perumahan Rakyat terus mendistribusikan alat swadaya yang menginspirasi ini untuk membantu masyarakat mengatasi masalah perumahan tidak layak huni di seluruh wilayah.

Salah satu daerah sasaran pengelolaan rumah tidak layak huni (RTLH) oleh dinas PUPR adalah Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan persnya, Rabu, 6 November 2019, mengatakan, salah satu upaya pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, untuk membenahi permasalahan RTLH di Kabupaten Flores Timur, melalui penyaluran program Dana Stimulus Perumahan (BSPS) Yayasan Keamanan. Dukungan pemerintah dalam bentuk dana insentif bertujuan untuk memperkuat semangat gotong royong di daerah. Pemerintah telah mengucurkan dana BSPS sebesar Rp 15 juta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan untuk membangun rumah baru.

METODE PENELITIAN

(RESEARCH METHOD)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016: 9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi suatu objek alam dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. Sedangkan menurut Saryono (2010: 1) menjelaskan pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dideskripsikan melalui pendekatan ini.

Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang dikaji oleh peneliti yaitu fokus terhadap pengelolaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Wilayah Flores Timur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori manajemen menurut George R. Terry, teori ini meliputi 4 prinsip manajemen yaitu :

1. Perencanaan
2. Organisasi (Organization)
3. Tindakan (motion) dan
4. Kontrol

Alasan peneliti menggunakan teori ini karena Teori Manajemen Menurut George R. Terry menjelaskan secara terperinci mengenai fungsi dari manajemen. Peneliti akan lebih mudah untuk menerapkan teori tersebut terhadap Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan tentang bagaimana Pengelolaan Program yang telah dilaksanakan itu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti mendapatkan informasi tentang data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian disini adalah tempat penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan daya tarik, orisinalitas dan relevansi dengan tema yang dipilih. (Suwama Al Muchtar, 2015:

243). Oleh karena itu, dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terletak di Jalan Batuata Desa Waihali Kabupaten Flores Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian Program Penunjang Perumahan Bisnis Freelance (BSPS) yang secara aktif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan instansi yang menyelenggarakan program tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat. dan pertanahan Kabupaten Flores Timur.

Metode Pengumpulan Dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2006:157), sumber data primer adalah sumber data primer dalam penelitian kualitatif yang berasal dari perkataan dan tindakan seseorang. Sumber data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh di lapangan melalui observasi atau wawancara. Para peneliti menggunakan data ini untuk melihat secara langsung pelaksanaan program swadaya di wilayah Flores Timur.

2. Data sekunder

Sugiyono (2016:225) menegaskan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung disampaikan kepada peneliti dari orang lain atau dari literatur, dll. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari sumber data primer, seperti bahan pustaka, dokumen, penelitian terdahulu, buku dan laporan kegiatan perpustakaan. Para peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat temuan mereka dan melengkapi informasi yang dikumpulkan dalam wawancara tatap muka dengan pemangku kepentingan

HASIL DAN PEMBAHASAN

(RESULT AND DISCUSSION)

1. Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan program Bantuan Stimulus Perumahan Mandiri (BSPS) di Kawasan Flores Timur, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumen. Data tersebut kemudian disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut untuk memecahkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi.

Program Swadaya Perumahan (BSPS) merupakan program pemerintah di seluruh kabupaten di Indonesia. Dalam pengelolaannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang harus dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan program bantuan akumulasi perumahan diperoleh data sebagai berikut:

a. Perencanaan

Informasi Perencanaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Mandiri diperoleh melalui wawancara. Penyajian data Hasil wawancara perencanaan dengan pertanyaan “Bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan Program Dukungan Stimulus Perumahan Mandiri (BSPS) di Desa Lamabayung, Kec. Boleng?”

” Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) : “Jadi kita punya program BSPS ini mekanismenya hampir sama saja dengan BSPS Kabupaten, BSPS Provinsi dan BSPS pusat APBN dan pengelolaan ini untuk semua desa sama, mulai dari tahap awal yakni perencanaan itu, yang palingan utama adalah melakukan analisis kebutuhan dengan mengumpulkan data rumah tidak layak huni dari desa Setelah itu ada identifikasi dimana kami merencanakan untuk turun ke lapangan melihat kondisi rumah tidak layak huni tersebut.” (Wawancara, 21/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, Dinas perumahan sudah melakukan tindakan yang tepat karena turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi RTLH, namun akan lebih baik lagi jika pada saat turun kelapangan kebutuhan yang dikaji harus benar-benar terperinci agar dapat menghindari keminusan pada dana. Karena seperti yang kita tahu bahwa pemerintah hanya mengucurkan dana Rp 15.000.000 untuk masing-masing KK, dan perlu diingat bahwa setiap masing-masing KK belum tentu membutuhkan dana dengan jumlah yang sama untuk pembangunan rumah yang layak huni. Apa lagi sebagian besar

penduduk di Desa Lamabayung ini bermatapencaharian sebagai petani, tentunya akan menimbulkan beban baru bagi penerima bantuan jika dalam proses pembangunan rumahnya dananya kurang. Dan itu otomatis dana sisanya ditanggung oleh penerima bantuan sendiri. Sehingga awalnya niatnya untuk membantu tetapi pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Hal inilah yang perlu dihindari.

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan : “Perencanaan awal itu Dinas hanya mengusulkan lokasi sedangkan yang memvonis atau menentukan lokasi itu dari Kementrian PUPR. Sementara penerimanya itu nanti dikembalikan kepada dinas untuk menentukan melalui verifikasi.” (wawancara, 22/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan lokasi sudah sesuai sesuai prosedur, dalam artian tidak asal-asalan untuk menentukan lokasi. Dan orang dari kementrian tentunya mempunyai standar sendiri untuk menentukan apakah masyarakat yang bersangkutan layak menerima bantuan atau tidak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masalah-masalah seperti penyimpangan yang dilakukan oleh para pelayan publik bisa saja terjadi karna faktor kekeluargaan atau orang dalam yang masih kental. Seperti kasus-kasus yang sering muncul dimana masyarakat yang sebenarnya mampu tetapi mendapat bantuan sosial, setelah ditelusuri ternyata ada anggota keluarganya yang bekerja di dinas sosial.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pendapat Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung, menurutnya:

“ Pada Tahap perencanaan kami mengusulkan Desa Lamabayung sebagai Lokasi penerima BPS ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, kemudian Tim Teknis datang untuk melakukan verifikasi.” (Wawancara, 23/06/2022).

Kemudian Bapak Paulus Ola Eban selaku masyarakat penerima BPS mengatakan “ Waktu perencanaan awal itu, kami di informasikan oleh pemerintah desa untuk datang mengikuti pertemuan dikantor desa tentang bantuan ini. dan kami yang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu ini yang mendapatkan bantuan “. (Wawancara,24/06/2022.

Melihat dari jawaban diatas, sebenarnya intinya sama seperti jawaban dari Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) yakni

prosedur penentuan lokasi yang sudah baik dan benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada rekayasa dalam informasi yang diberikan.

Kemudian Bapak Paulus Ola Eban selaku masyarakat penerima BSPS mengatakan “Waktu perencanaan awal itu, kami di informasikan oleh pemerintah desa untuk datang mengikuti pertemuan dikantor desa tentang bantuan ini. dan kami yang termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu ini yang mendapatkan bantuan“. (Wawancara,24/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, dapat di lihat bahwa kerja dari dinas dalam melakukan perencanaan sudah tepat sasaran namun ada baiknya dari masyarakat sendiri harus bisa lebih jeli untuk menyampaikan aspirasinya seperti dana yang dibutuhkan sebnarnya berapa, tidak hanya sebatas mengiyakan saja. Karena masyarkat juga harus tau jelas dari mana sumber dananya, jumlahnya berapa, apakah sesuai atau masih kurang. Karena jika tidak akan muncul masalah baru seperti yang sudah penulis terangkan diatas bahwa jika danannya kurang maka akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat sendiri.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Perencanaan	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1.	Memperhatikan Kondisi dilapangan	✓	
2.	Memperhatikan Keberhasilan	✓	
3.	Memperhatikan Kegagalan		✓
4.	Memperhatikan potensi, tantangan dan kendala	✓	
5.	Merubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang	✓	
6.	Mengikut sertakan pihak terkait	✓	
7.	Memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak terkait	✓	

8.	Mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, demokratis, transparan dan praktis	✓	
No	Perencanaan	Terbentuk	
		Ya	Tidak
1.	Tujuan	✓	
2.	Anggaran	✓	
3.	Standar Metode Kerja	✓	
4.	Prosedur dan Jenis Kegiatan	✓	

*Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022*

b. pengorganisasian

Pengorganisasian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah identifikasi, pengelompokan dan pengaturan jenis kegiatan diperlukan untuk mencapai tujuan, alokasi orang (staf) untuk kegiatan tersebut. Data penyelenggaraan program bantuan stimulus perumahan mandiri dengan pertanyaan “Bagaimana kinerja organisasi dalam pengelolaan program bantuan stimulus perumahan mandiri (BSPS) di desa Lamabayung Kec. Ile Boleng?

Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) :

“untuk pengorganisasiannya mula-mula dilakukan perekrutan fasilitator, pendamping untuk melakukan kegiatan dilapangan, kemudian penentuan Tim Teknis BSPS ini. Untuk fasilitator desa lamabayung ini ditetapkan dari provinsi karena dana dari provinsi” (Wawancara, 21/06/2022)

Melihat dari jawaban di atas dapat dinilai bahwa koordinasi antar dinas di kabupaten dengan orang dari provinsi berjalan baik.

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan : “untuk pembagaian tugas, strukturnya dari pusat, ke Provinsi. Karena untuk desa Lamabayung ini dana dari Provinsi maka penentuan Penanggung Jawab dan fasilitator ditetapkan dari provinsi, Dinas hanya sebagai sambung tangan , koordinasi sampai klinik paling bawah Sehingga dibuatlah surat keputusan. Dalam SK ini melibatkan bupati sampai kepala desa .” (wawancara, 22/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, dapat koordinasi anatar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini sangat terstruktur dan sesuai prosedurnya.

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung mengatakan :

“ Dalam program bantuan ini, yang kami pemerintah desa tahu bahwa pengorganisasiannya berjalan seperti pada prosedurnya, yakni dari tingkatan pusat ke provinsi baru ke tingkat daerah “. (Wawancara, 23/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, dapat dinilai bahwa orang di desa hanya mengiyakan segala prosedur yang dilakukan dari atasan karena orang didesa tentunya tidak telalu tau bagaimana proses kerja orang dari pemerintah pusat maupun provinisi, jadi yang mereka tau adalah apa yang sudah direncanakan harus berjalan, karena jika tidak berarti anggapan orang desa bahwa orang-orang yang bekerja di pemerintah pusat maupun provinsi mulai melakukan penyimpangan.

Bapak Paulus Ola Eban selaku masyarakat penerima BSPS mengatakan :

“ Saya kurang paham bagaimana pengorganisasiannya, yag kami tahuya bantuan itu kan dari pemerintah kita baru turun kedesa dan sampai kepada kami masyarakat ini “. (Wawancara,24/06/2022)

Melihat dari jawaban di atas, dapat di simpulkan bahwa prespektif masyarakat atau pun orang didesa rata-rata hampir sama, yakni jika apa yang direncanakan itu berjalan, berarti pemerintah dianggap bekerja dengan baik, tetapi jika tidak berjala berarti pemerintah dianggap bekerja kurang baik. Hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pembuktian bahwa pemerintah benar –benar bekerja untuk masyarakat. Karena yang masyarakat butuh itu adalah bukti, bukan janji.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Pengorganisasian	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1	Menentukan dan menentukan tugas dengan hati-hati	✓	
2	Membagi pekerjaan menjadi tugas individu	✓	
3	Memindahkan tugas berdasarkan lokasi	✓	
4	Menentukan persyaratan berdasarkan lokasi	✓	

No	Perorganisasian	Terbentuk	
		Ya	Tidak
1.	Kewenangan	✓	
	Surat Rekomendasi	✓	
	Perintah	✓	
2.	Alokasi Tugas	✓	
	Struktur Organisasi	✓	
	Sertifikat	✓	
	Surat Keputusan	✓	
3.	Ada manajer senior (penanggung jawab program)	✓	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

c. Pergerakan

Gerakan atau pelaksanaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu rencana dan suatu organisasi dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Mendengar data pelaksanaan program bantuan stimulus perumahan mandiri yang menanyakan pertanyaan “Bagaimana langkah atau implementasi yang dilakukan dalam pengelolaan program bantuan stimulus perumahan mandiri (BSPS)?” di Desa Lamabayung, Pulau Kec Boleng?»

Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) :

”pada pelaksanaan ini , dimulai dengan penyiapan masyarakat dimana Masyarakat yang menerima program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni. Program ini bukan untuk membantu masyarakat miskin seperti beda rumah tetapi untuk masyarakat yang punya penghasilan rendah dibawah rata-rata UMR yang mempunyai rumah tidak layak huni. Setelah dilihat semua, terakhir di Tanya kesiapan dari masyarakat apakah dia bersiap berswadaya atau tidak. Kalau masyarakat siap maka kita bisa mulai tahap selanjutnya. Hal tersebut kami jelaskan dalam sosialisasi di kantor desa. kemudian setelah itu ada verifikasi untuk calon penerima BSPS. Setelah itu kan penerimanya sudah ada. Kemudian kita baru melakukan kesepakatan terkait tanggung renteng, membuat RAB untuk

mengetahui harga barang. Jadi para penerima tadi dibentuk Kelompok biasanya disebut Kelompok Penerima Bantuan atau disingkat KPB. Kemudian KPB itu bersama pendamping melakukan survey/ suplayer material ke beberapa toko bangunan. Pada tahap ini mereka mensurvei untuk melihat harga terendah di toko mana kemudian dilakukan negosiasi dengan suplayer. Suplayer yang kita survey juga ada kriteria yaitu dia harus punya gudang, harus punya stock material dan harus punya armada untuk mengantar material itu. Setelah itu pendamping mendampingi penerima untuk membuat RAB yakni Rancangan Anggaran Biaya berdasarkan kebutuhan penerima. Berkaitan dengan tenaga kerja, pada program ini diutamakan sistem gotong royong. kelompok tadikan sudah dibentuk, nah dari kelompok ini yang melaksanakan gotong royong. (Wawancara, 21/06/2022)

Melihat dari jawaban ini, sangat bertolak belakang dengan pernyataan diawal bahwa pemerintah hanya memberikan Rp.15.000.000 untuk masih KK dan apa bila dananya tidak cukup maka sisanya ditanggung penerima sendiri. yang mengganjal pada jawaban ini adalah Bapak Philipus Ata Jawa Balun mengatakan RAB berdasarkan kebutuhan penerima, berarti bisa saja jika kebutuhan membangun rumah dananya diatas Rp.15.000.000, karena tidak semua orang mempunyai kebutuhan dengan jumlah dan nilai yang sama, pastinya berbeda-beda baik dari kebutuhan material bangunan, luas rumah dan lain-lain. Harusnya ada ketegasan dan transparansi yang jelas jika sudah berhubungan dengan uang. Karena jawaban ini menimbulkan tanggapan-tanggapan dan kecurigaan lain terhadap pernyataan ini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) ia mengatakan :

“yang pertama itu kami melaksanakan sosialisasi, kemudian tahapan verifikasi setelah ada penerima BSPS ada tahapan rembuk, rembuk disini adalah penentuan suplayer, pembuatan RAB oleh Penerima. ” (wawancara, 22/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, sudah sesuai langkah-langkah yang tepat pergerakan yang dilakukan, baik dari pelaksanaan sosialisasi, verifikasi sampai dengan RAB. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pembuatan RAB harus lah sesuai dan tranparan dengan jumlah anggaran yang direncanakan. Karena apa bila sudah ada rekayasa dana maka untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat akan menjadi sulit.

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung mengatakan :

“ Pemerintah desa awalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian melakukan pendataan terhadap masyarakat yang termasuk dalam kategori memiliki rumah tidak layak huni dan itu bicarakan secara transparan dengan semua kalangan masyarakat secara langsung baik dari segi anggaran sampai ke hal-hal teknisnya” (Wawancara, 23/06/2022).

Melihat dari jawaban diatas, pemeritah desa sudah bergerak dengan sangat baik karena langsung ada transparansi antar pemerintah desa dengan msayarakat setempat. Transaparansi inilah yang harusnya dimiliki semua lembaga-lembaga pelayanan publik.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pendapat Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BSPS ketika ditanya bagaimana Pelaksanaan yang mereka jalani. Menurutnya:

“awalnya saya mengikuti sosialisasi, rumah saya sebelumnya dari kayu, dan swadaya saya juga cukup sehingga ketika ditanya kesiapan, saya siap dan memenuhi pesyaratan-persyaratan itu surat-surat. saya ditetapkan untuk menerima bantuan. Setelah itu Kami diminta untuk menyusun RAB untuk bahan-bahan yang kami butuhkan. Jadi semen pemerintah tanggung batu, pasir kalau kurang kami tanggung dengan swadaya kami. Untuk tenaga kerja secara berkelompok, gotong royong begitu tapi karena terlalu lama jadi saya sama keluarga yang kerjakan sendiri.” (Wawancara, 24/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, dapat dilihat bahwa prosedur pergerakan yang ditawarkan melalui pembagian kelompok masih kurang efektif karena memperlambat pembangunan rumah. Dan untuk kekurangan dana ini harusnya pemerintah tidak menyamaratakan semua kondisi rumah dengan jumlah dana yang sama. Karena tentunya ada RTLH yang butuh biaya lebih, ada juga yang butuh biaya kurang dari yang ditentukan. Jika ingin mewujudkan keadilan sosial, keadilan itu bukan harus jumlah yang sama rata, tetapi keadilan itu sama-sama merasakan.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Pengerakan/ Pelaksanaan	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1.	Pemberian Perintah dari atasan kebawahan	✓	
2.	Unsur Perintah Resmi	✓	
3.	Menggunakan jenis perintah (lisan, tulisan)	✓	
No	Pengerakan	Optimal	
		Ya	Tidak
1.	Sosialisasi	✓	
2.	Verifikasi Calon penerima	✓	

3.	Kesepakatan calon Penerima	✓	
4.	Membentuk Kelompok Penerima	✓	
5.	Menentukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan	✓	
6.	Identifikasi Kebutuhan Proposal	✓	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan memantau program, staf, dana, fasilitas dalam penyelenggaraan Program Bantuan Stimulus Swadaya Perumahan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Wawancara menceritakan supervisi dengan pertanyaan “Bagaimana supervisi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program Stimulasi Swadaya (BSPS) di Desa Lamabayung, Kec. Pulau Boleng?”

Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) :

” Untuk pengawasan ini meliputi kegiatan memantau pelaksanaan pembangunan rumah yang dilakukan oleh para kelompok penerima bantuan. Pengawasan biasanya dilakukan seminggu sekali oleh fasilitator maupun pendamping” (Wawancara, 21/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, dapat dianggap bahwa pengawasan yang dilakukan harus seputar proses pembangunan berjalan atau tidak tetapi hal-hal teknis lain seperti penggunaan dana seberapa kurang diperhatikan dan terlebih hal-hal logistik bagi para pekerja yang dalam tanda kutip adalah masyarakat yang diminta untuk saling gotong royong. Bisa saja pola pergerakan dengan melalui gotong royong tidak efektif karena masyarakat yang dikerjakkan tidak diperhatikan kebutuhan logistiknya seperti makan minum dan lainnya, seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BSPS diatas tadi.

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan bahwa :

“ Kami melakukan pengawasan itu pertahap, jadi pada tahap pertama pada saat pendropingan, kemudian 1 minggu sesudah pendropingan juga kami turun untuk controlling dan terakhir pada saat selesai pembangunan.” (wawancara, 22/06/2022)

Melihat dari jawaban diatas, inti jawabannya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST (selaku Kepala bidang Perumahan) yakni pengawasan yang dilakukan tidak secara keseluruhan tetapi hanya pada proses bangunannya sudah jadi atau belum, hal teknis lainnya kurang diperhatikan.

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung mengatakan :

“ Untuk pengawasan dari pihak pemerintah daerah kabupaten juga turun untuk melakukan pengawasan pada saat pembangunan rumah tidak layak huni. Pengawasan dilakukan sejak

saat pertama pembangunan, kemudian pada saat pembangunan dan ketika selesai pembangunan jadi sangat baik pengawasannya”.

Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BPS juga mengatakan :

“ Pengawasannya memang tidak tiap hari tetapi beberapa minggu sekali, waktu itu pertama mulai pembangunan itu juga ada pemerintah yang turun untuk melihat-lihat, kemudian ketika rumah sementara dibangun juga orang-orang dari pemerintah daerah juga datang untuk melihat perkembangan pembangunan. “

Melihat dari jawabanya diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya seputar pengawasan proses pembangunan secara fisik, tetapi hal-hal teknis lainnya masih kurang diperhatikan. Harusnya pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar apa yang di kerjakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mengumpulkan informasi perencanaan, penulis juga melakukan pengamatan sebagai berikut:

No	Pengawasan	Dilaksanakan	
		Ya	Tidak
1.	Menetapkan ukuran	✓	
2.	Memonitor hasil	✓	
3.	Membandingkan hasil dengan ukuran	✓	
4.	Perbaiki penyimpangan	✓	

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Flores Timur

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

a. Faktor pendukung

Faktor Pendukung adalah faktor yang mendukung berjalannya program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Seperti yang di utarakan Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST selaku Kepala bidang Perumahan melalui wawancara pada tanggal 21 Juni 2022. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur :

“yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pada Desa Lamabayung ini karena masyarakatnya yang sangat partisipasi dalam program ini sehingga pelaksanaan Program BSPS berjalan dengan lancar.

b. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat adalah faktor yang menghambat berjalannya program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Seperti yang di utarakan Bapak Philipus Ata Jawa Balun, ST selaku Kepala bidang Perumahan melalui wawancara pada tanggal 21 Juni 2022. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur :

”Biasa yang menghambat selama ini, yang paling menghambat adalah tenaga kerja. Karena yang pertama itu memang karena ada swadainya tapi tenaga kerja ini memang sekarang semangat gotong royong sudah mulai hilang sehingga penerima mencari tenaga upah agak susah apalagi dia harus bayar tambahan lagi untuk bayar upah tukang itu. Selama ini kendala yang kami temukan dilapangan seperti itu. Kemudian swadainya, mereka bilang siap berswadaya tapi dalam kenyataan itu kan masyarakat banyak yang punya penghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, guru memang ada tapi tidak tetap begitu. Kadang penghambatnya disitu tapi biarapun begitu mereka bangun sampai selesai dan tepat waktu”

Ibu Maria Katharina M.T.Batha, St (selaku Kepala Seksi Penetapan Subjek Dan Objek Tanah) juga mengatakan bahwa :

“faktor penghambat yang paling besar disini adalah keterlambatan pendropingan dari suplayer, cuaca juga tidak mendukung sehingga menghambat program ini.”
(wawancara,22/06/2022)

Bapak Tarsisius Asan selaku Sekretaris Desa Lamabayung saat di wawancarai pada tanggal 23 Juni 2022, menurutnya :

“kalau faktor penghambat dalam pengelolaan saya rasa sangat kecil, mungkin keterlambatan bahan tetapi tidak seberapa mungkin molor 2 atau 3 hari”

Bapak Paulus Ola Eban selaku Penerima BSPS ketika ditanya mengenai kendala yang dialami selama tahap awal sampai selesai, ia mengatakan bahwa:

“kalau hambatan itu saya rasa tidak terlalu, semua berjalan lancar dari awal hanya saja dalam pembanguann tenaga kerja saya inikan petani, kita mau buru cepat juga tergantung tenaga kerja juga. Tapi biar begitu semua rumah disini terselesai serentak dan tepat waktu.” (Wawancara, 24/06/2022)

Hal sama juga di ungkapkan oleh Bapak Rofinus Bulet Murin selaku penerima BSPS “untuk kendalanya saya rasa tidak ada sama sekali.” (Wawancara, 24/06/2022)

3. Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Flores Timur, Desa Lamabayung, Kecamatan Ile Boleng

Permasalahan Rumah tidak layak huni di Desa Lamabayung, Kecamatan Ile Boleng, meminta pemerintah meningkatkan kualitas rumah, salah satunya melalui program stimulus perumahan swadaya (BSPS) yang dijalankan oleh Biro Rumah dan Lahan Flores Timur yang dioperasikan. Agar program stimulus perumahan mandiri Menurut George R. Terry (dalam Sukarna, 2011:3), manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan atau digabungkan dengan usaha orang lain.

Dibawah ini pembahasan yang akan peneliti paparkan merupakan hasil dari penelitian di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur serta pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng melalui teknik wawancara dengan informan. Selain peneliti juga melakukan observasi serta melakukan dokumentasi foto untuk menjawab ke dua (2) rumusan masalah. Peneliti menggunakan Teori George R. Terry dalam (Sukarna, 2011:10) mengemukakan bahwa dalam manajemen terdapat proses-proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian dan pengendalian. Maka berdasarkan hasil penelitian tentang penyelenggaraan Program Stimulus Swadaya Perumahan (BSPS), diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah pemilihan fakta dan peristiwa yang relevan, membuat dan menggunakan prediksi atau hipotesis untuk masa depan dengan menjelaskan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Sukarna, 2011:82-83).

Perencanaan yang baik dimungkinkan dengan memperhatikan situasi saat ini, memperhatikan keberhasilan dan kegagalan, memperhatikan potensi, tantangan dan hambatan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman, ancaman dalam kesempatan, melibatkan pemangku kepentingan dan memperhatikan komitmen dan sinergi. .

Berdasarkan data penelitian, ditentukan tujuan dari program ini, yaitu membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Standar metode kerja, prosedur, dan jenis kegiatan ditetapkan dalam Pedoman Penunjang Perumahan Wiraswasta (BSPS) Kabupaten Flores Timur. Perencanaan program bantuan stimulus perumahan mandiri juga memenuhi separuh kriteria, seperti memperhatikan kondisi tapak dengan mempertimbangkan kondisi rumah tidak layak huni di desa Lamabayung. . Memperhatikan potensi, tantangan dan hambatan yang masih ada, khususnya melihat kecukupan otonomi yang terorganisir dan dukungan masyarakat. Kemudian tentukan strateginya. Kemudian, perhatikan kelemahan yang ada sebagai kekuatan dan ancaman sebagai peluang. Serta melibatkan pemangku kepentingan yaitu kepala desa. Dan mengkoordinir para pemangku kepentingan, mulai dari camat untuk mendapatkan data tentang rumah miskin dan tidak layak huni pemerintah desa Lamabayung.

Namun dalam perencanaan juga terdapat kriteria perencanaan yang tidak diikuti oleh pengelola saat membuat program. Membantu merangsang perumahan swadaya, khususnya berfokus pada kegagalan. Hal ini dilakukan karena manajer lebih fokus pada kesuksesan, sehingga manajer memiliki keterbatasan dalam menganalisis sejauh mana kegagalan tersebut dapat terjadi. Perencanaan yang ada mampu mengimplementasikan program, lebih optimal jika kriteria perencanaan terpenuhi dengan baik.

b. Organisasi

“Organisasi adalah pengidentifikasian, pengelompokan dan pengaturan jenis kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengalokasikan orang (karyawan) untuk kegiatan ini, menyediakan elemen fisik yang sesuai untuk tujuan pekerjaan dan penunjukan hubungan kekuasaan, ditugaskan untuk semua mereka yang terlibat dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan (di Sukarna, 2011:38)

Organisasi yang baik menyelesaikan kegiatan, yaitu pembagian kerja dengan cermat mendefinisikan dan mendefinisikan pekerjaan yang harus dilakukan, mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab di mana pekerjaan dibagi menjadi tugas masing-masing orang, dan pembagian kekuasaan, pembagian tugas menurut ke posisi. dan menentukan kondisi menurut lokasi atau tujuan.

Menurut data penelitian, penyelenggaraan program swadaya pembangunan perumahan telah memenuhi kriteria yang ada seperti mengidentifikasi dan menentukan secara menyeluruh pekerjaan yang akan dilakukan yaitu pembentukan tim teknis, teknik dan menentukan pekerjaan yang akan dilakukan , yaitu sosialisasi. kegiatan yang terkait dengan program dukungan stimulus perumahan mandiri, memverifikasi objek kandidat, menyepakati calon penerima manfaat, membentuk kelompok penerima manfaat, mengidentifikasi toko/pemasok bahan mengembangkan dan mengidentifikasi kebutuhan yang diusulkan.

Didalam Tim Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri dari Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil, Sekretaris dan anggota. Dilakukan pula pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yakni adanya Koordinator Fasilitator dan Tenaga

fasilitator Lapangan yang bertugas untuk mendampingi penerima untuk membentuk kelompok Penerima Bantuan dan kemudian menjalankan tugas dalam jabatan pimpinan, menjalin hubungan baik, bertanggung jawab dan selalu berkoordinasi dalam proses penyelenggaraan. kemudian ada pula penentuan syarat-syarat sesuai posisi yakni ketentuan posisi-posisi dalam pengorganisasian ini ada dalam ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Pertanahan sehingga koordinasinya lebih mudah. Peneliti menyimpulkan bahwa alokasi tugas dan wewenang dalam pengelolaan program perumahan swadaya berjalan dengan baik, terutama dengan ditemukannya SK pembentukan kelompok bantuan teknis perumahan swadaya dan Surat Tugas dari Operator Lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi berjalan dengan baik.

c. Pergerakan (Actuating)

Gerakan atau eksekusi ini merupakan kegiatan yang dilakukan manajer untuk memulai kegiatan lanjutan diidentifikasi. Dari pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilakukan yaitu penyampaian perintah atasan kepada bawahan, memperhatikan unsur perintah dan jenis perintah yang diberikan (lisan, lisan, dsb).

Selama pelaksanaan program bantuan stimulus perumahan mandiri, direncanakan kegiatan yaitu sosialisasi terkait program bantuan stimulus perumahan mandiri, verifikasi penerima potensi, kesepakatan objek potensial, pembentukan kelompok penerima manfaat, identifikasi toko/bangunan Pemasok bahan dan identifikasi kebutuhan yang diusulkan telah direalisasikan.

Advokasi atau implementasi ini berlangsung secara optimal karena ia telah berhasil menyelesaikan target mobilisasi dan implementasi, khususnya dalam manajemen, ia melakukan transmisi perintah dari atasan ke bawahan, dengan memperhatikan kategori dan jenis pesanan agar operasi yang direncanakan berjalan dengan lancar.

d. Pengawasan (Controlling)

Pemantauan dapat dikembangkan sebagai suatu proses untuk menentukan apa yang perlu dicapai yaitu standar, apa yang perlu dilakukan yaitu evaluasi kinerja dan jika perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana standar (dalam Sukarna, 2011:82) Selama pemantauan, beberapa faktor harus diperhitungkan, yaitu pengaturan pengukuran, pemantauan hasil, perbandingan hasil dengan pengukuran dan koreksi penyimpangan.

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa pengawasan dilakukan secara bertahap. Ada pula pengawasan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan selaku pendamping masyarakat yakni seminggu sekali untuk memonitor keadaan yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini Tenaga Fasilitator Lapangan telah menetapkan ukuran-ukuran sehingga menetapkan standar keberhasilan sebagai pembanding hasil kemudian memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan ini sudah terlaksana dengan baik karena adanya penetapan ukuran-ukuran

sebagai pembanding hasil untuk mengetahui adanya penyimpangan. Kemudian dilakukan perbaikan atas penyimpangan sehingga Pembangunan sesuai dengan yang ditetapkan.

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng

a. Faktor Pendukung

Penelitian Berbasis Bukti sebagai Faktor Pendukung Dalam Manajemen Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng adalah Partisipasi pemerintah Desa dan Masyarakat desa Lamabayung yang sangat Tinggi sehingga Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tepat sasaran dan tepat waktu.

b. Faktor Penghambat

Penelitian Berbasis Bukti yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng adalah:

1. Keterlambatan Pendropingan Bahan

Bahan merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan. Keterlambatan Pendropingan Bahan Oleh Suplayer menjadi faktor penghambat. Keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung.

2. Kurangnya Tenaga Kerja

Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini memang diterapkan sistem Gotong Royong Jadi pembangunan rumah ini dilakukan secara bergantian. Namun di zaman ini semangat gotong royong sudah mulai hilang, dan untuk mencari tenaga upah pun agak susah.

SIMPULAN

(CONCLUSION)

Berdasarkan pembahasan dan yang dilakukan oleh peneliti, yang menyimpulkan sebagai berikut: Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Dinas Perumahan, Kawasan pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng untuk perencanaan sudah berjalan baik, hanya saja masih kurang jeli melihat jumlah kebutuhan dengan RAB yang akan dibuat sehingga tidak seimbang, kemudian pengorganisasiannya juga sudah berjalan sesuai prosedur, untuk pergerakan dari pihak pemerintah sudah cukup maksimal namun pola gotong royong yang

dibuat dimasyarakat masih kurang efektif dimasyarakat, dan untuk pengawasan, yang dilakukan dinas perumahan itu tidak menyeluruh dan hanya seputar pengawasan terhadap proses pembangunan fisik bangunan saja.

1. Faktor pendukung pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Flores Timur Pada Desa Lamabayung Kecamatan Ile Boleng adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lamabayung kooperatif dengan adanya program ini. Sedangkan faktor penghambat Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Keterlambatan Pendropingan Bahan oleh Suplayer dan Kurangnya Tenaga Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

(REFERENCES)

- Aceng Ulumudin, N., Karmila, M., & Amrilah, R. R. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 1–8.
- Annisa Rahmah. (2016). Analisis Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta. *Fakutas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia*.
- Dunn, W.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi ke-2). Pers Universitas Gadjah Mada.
- Fayol, H. (2010). Manajemen hubungan masyarakat. PT.ElexMedi.
- Fitriani, A. (Pada 2020). Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Panitia Partai Provinsi Lampung Tengah dalam memberikan dukungan perumahan mandiri memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Universitas Lampung.
- Handoko, T.H. (2009). Manajemen (edisi ke-20). BPE.
- Mamangkey, A., Lumolos, J. dan Peman, F. (2019). Pelaksanaan Program Dukungan Stimulus Perumahan Mandiri (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi.
- Miles, Huberman, & Saldjana. (2014). *Analisis Data Kualitatif Edisi Ketiga*. Indonesia University Press.
- Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, S. Al. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.
- Mukhlis, S., Siam, N. U., & Junidar. (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 2(2), 445–460.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Patimah, S. H. (2012). Pengelolaan Perpustakaan Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. *Universitas Negeri Yogyakarta*.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Kepegawaian Bab IV Pasal 11 ayat (1). (Pada 2022).
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bab IV Pasal 11 ayat (1)
tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan. Pemerintah Indonesia.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed. Methods)*. Alfabeta.
- Sukarna. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju.
- UU No.1 Tahun 2011. (2011). *UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Pemerintah Indonesia.
- Wendri, S. (2018). Analisis Pengelolaan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Kuntan Singing. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riuu*.
- Widayanti, R., & Rosdiana, W. (2019). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. *Universitas Negeri Surabaya*.